



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015
KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019**

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 MEI 2019**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015
KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 327);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2003 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.

Pasal 2

Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada masa kerja golongan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan cara sebagai berikut:

- a. gaji pokok lama golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar A-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- b. gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar B-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- c. gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
- d. gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar D-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar instansi induknya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.
- (3) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi induknya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima perbantuan; atau

- b. apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

Pasal 4

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat struktural di lingkungannya paling rendah pejabat administrator.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Angka II Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada pejabat yang diberi delegasi dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Pemegang Kas/Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan; dan
- b. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Pemegang Kas/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;

- b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
- c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penyesuaian gaji pokok didasarkan atas masa kerja golongan sebelum dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penyesuaian gaji pokok berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama menjalani hukuman disiplin, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada tanggal 31 Desember 2018; dan
 - b. setelah selesai menjalani hukuman disiplin, penyesuaian gaji pokok berdasarkan gaji pokok baru sesuai golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya.
- (3) Keputusan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Angka III Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Pemegang Kas/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
- b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
- c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau sedang menerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi yang sedang menjalani pemberhentian sementara, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018; atau
- b. bagi penerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan pada saat yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak uang tunggu.

Pasal 10

Penyesuaian gaji pokok Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan cara sebagai berikut:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar A-1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- b. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar B-1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau

- c. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C-1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

Dalam hal yang akan disesuaikan merupakan gaji pokok Hakim, ketentuan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku secara mutatis mutandis dengan penyesuaian gaji pokok Hakim sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan cara sebagai berikut:

- a. gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
- b. gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar D-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 519

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN
 GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
 PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM
 GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019

DAFTAR A-1

GOLONGAN RUANG I/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)	PP NO. 15 TAHUN 2019 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.486.500	1.560.800
2	1	1.486.500	1.560.800
3	2	1.533.400	1.610.000
4	3	1.533.400	1.610.000
5	4	1.581.700	1.660.700
6	5	1.581.700	1.660.700
7	6	1.631.500	1.713.000
8	7	1.631.500	1.713.000
9	8	1.682.900	1.766.900
10	9	1.682.900	1.766.900
11	10	1.735.900	1.822.600
12	11	1.735.900	1.822.600
13	12	1.790.500	1.880.000
14	13	1.790.500	1.880.000
15	14	1.846.900	1.939.200
16	15	1.846.900	1.939.200
17	16	1.905.100	2.000.300
18	17	1.905.100	2.000.300
19	18	1.965.100	2.063.300
20	19	1.965.100	2.063.300
21	20	2.027.000	2.128.300
22	21	2.027.000	2.128.300
23	22	2.090.800	2.195.300
24	23	2.090.800	2.195.300
25	24	2.156.700	2.264.400
26	25	2.156.700	2.264.400
27	26	2.224.600	2.335.800
28	27	2.224.600	2.335.800

GOLONGAN RUANG I/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)	PP NO. 15 TAHUN 2019 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1,623,400	1,704,500
5	4	1,623,400	1,704,500
6	5	1,674,500	1,758,200
7	6	1,674,500	1,758,200
8	7	1,727,300	1,813,600
9	8	1,727,300	1,813,600
10	9	1,781,700	1,870,700
11	10	1,781,700	1,870,700
12	11	1,837,800	1,929,600
13	12	1,837,800	1,929,600
14	13	1,895,700	1,990,400
15	14	1,895,700	1,990,400
16	15	1,955,400	2,053,100
17	16	1,955,400	2,053,100
18	17	2,016,900	2,117,700
19	18	2,016,900	2,117,700
20	19	2,080,500	2,184,400
21	20	2,080,500	2,184,400
22	21	2,146,000	2,253,200
23	22	2,146,000	2,253,200
24	23	2,213,600	2,324,200
25	24	2,213,600	2,324,200
26	25	2,283,300	2,397,400
27	26	2,283,300	2,397,400
28	27	2,355,200	2,472,900

GOLONGAN RUANG I/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)	PP NO. 15 TAHUN 2019 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1,692,100	1,776,600
5	4	1,692,100	1,776,600
6	5	1,745,400	1,832,600
7	6	1,745,400	1,832,600
8	7	1,800,300	1,890,300
9	8	1,800,300	1,890,300
10	9	1,857,000	1,949,800
11	10	1,857,000	1,949,800
12	11	1,915,500	2,011,200
13	12	1,915,500	2,011,200
14	13	1,975,800	2,074,600
15	14	1,975,800	2,074,600
16	15	2,038,100	2,139,900
17	16	2,038,100	2,139,900
18	17	2,102,300	2,207,300
19	18	2,102,300	2,207,300
20	19	2,168,500	2,276,800
21	20	2,168,500	2,276,800
22	21	2,236,800	2,348,500
23	22	2,236,800	2,348,500
24	23	2,307,200	2,422,500
25	24	2,307,200	2,422,500
26	25	2,379,900	2,498,800
27	26	2,379,900	2,498,800
28	27	2,454,800	2,577,500

GOLONGAN RUANG I/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)	PP NO. 15 TAHUN 2019 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1,763,600	1,851,800
5	4	1,763,600	1,851,800
6	5	1,819,200	1,910,100
7	6	1,819,200	1,910,100
8	7	1,876,500	1,970,200
9	8	1,876,500	1,970,200
10	9	1,935,600	2,032,300
11	10	1,935,600	2,032,300
12	11	1,996,500	2,096,300
13	12	1,996,500	2,096,300
14	13	2,059,400	2,162,300
15	14	2,059,400	2,162,300
16	15	2,124,300	2,230,400
17	16	2,124,300	2,230,400
18	17	2,191,200	2,300,700
19	18	2,191,200	2,300,700
20	19	2,260,200	2,373,100
21	20	2,260,200	2,373,100
22	21	2,331,400	2,447,900
23	22	2,331,400	2,447,900
24	23	2,404,800	2,525,000
25	24	2,404,800	2,525,000
26	25	2,480,500	2,604,500
27	26	2,480,500	2,604,500
28	27	2,558,700	2,686,500

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019

DAFTAR B-1

GOLONGAN RUANG II/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO. 30 TAHUN 2015 (Rp)	PP NO. 15 TAHUN 2019 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1,926,000	2,022,200
2	1	1,956,300	2,054,100
3	2	1,956,300	2,054,100
4	3	2,017,900	2,118,800
5	4	2,017,900	2,118,800
6	5	2,081,500	2,185,500
7	6	2,081,500	2,185,500
8	7	2,147,000	2,254,300
9	8	2,147,000	2,254,300
10	9	2,214,700	2,325,300
11	10	2,214,700	2,325,300
12	11	2,284,400	2,398,600
13	12	2,284,400	2,398,600
14	13	2,356,400	2,474,100
15	14	2,356,400	2,474,100
16	15	2,430,600	2,552,000
17	16	2,430,600	2,552,000
18	17	2,507,100	2,632,400
19	18	2,507,100	2,632,400
20	19	2,586,100	2,715,300
21	20	2,586,100	2,715,300
22	21	2,667,500	2,800,800
23	22	2,667,500	2,800,800
24	23	2,751,600	2,889,100
25	24	2,751,600	2,889,100
26	25	2,838,200	2,980,000
27	26	2,838,200	2,980,000
28	27	2,927,600	3,073,900
29	28	2,927,600	3,073,900
30	29	3,019,800	3,170,700
31	30	3,019,800	3,170,700
32	31	3,114,900	3,270,600
33	32	3,114,900	3,270,600
34	33	3,213,000	3,373,600